

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oku Pansu¹, Irwan Yantu², Andi Juanna³, Tineke Wolok³, Melan Angriani Asnawi³

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia¹

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia²

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia³

Email: okupansu29@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the extent to which the village financial system influences the performance of the village government in Atinggola Sub-district, North Gorontalo Regency. The study adopted a quantitative approach utilizing correlational quantitative methods, with a sample size of 100 respondents. Data collection techniques included questionnaires and documentation, while data analysis was performed using simple regression analysis.

Keywords: Village Financial System; Performance.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif kolerasional dengan jumlah sampel 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi serta teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi sederhana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Nilai koefisien determinasi dari model regresi yang telah diperoleh sebelumnya menunjukkan bahwa ada pengaruh system keuangan desa terhadap kinerja aparat desa sebesar 0,266 atau 26,6% dan sisanya sebesar 73,4% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Sistem Keuangan Desa; Kinerja.

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara. Sementara menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Dalam mewujudkan program pemerintah pusat ke tingkat desa, maka perlu ada pemerintahan desa dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Sugiman (2018) berpendapat bahwa pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, serta dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Sementara menurut Admaja (2016) pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jefri (2023) juga mengemukakan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa atau dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan melihat betapa pentingnya peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka, sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah desa harus memiliki kinerja yang maksimal dalam hal menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mengembangkan wilayahnya secara berkelanjutan. Muslim dan Irwan (2014) mengemukakan bahwa kinerja pemerintah desa adalah sebagai bagian dari pemerintah harus mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi Kepala Desa khususnya dalam melakukan pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Tampubolon (2014) mengemukakan bahwa setiap organisasi dalam lingkup kecil atau besar mempunyai pemikiran yang positif maupun non positif mempunyai tujuan yang tinggi untuk mencapai kinerja yang lebih baik, kinerja juga bicara tentang apa yang dikerjakan seseorang dan akan membawahkan sebuah hasil. Nursalam (2015) berpendapat kinerja adalah hasil kinerja seseorang individu atau kelompok di dalam suatu industri untuk mencapai tujuannya sesuai dengan tanggung jawabnya dan wewenang, sesuai moral dan tidak melanggar hukum. Sedangkan Amir (2016) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu kelompok yang bersifat positif maupun tidak yang dihasilkan selama periode waktu yang ditentukan.

Widari dan Sutrisno (2017) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan salah satu media pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik yang berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah desa untuk dimasa yang akan datang, oleh sebab itu pemerintah desa dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga hasil dari publikasi laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang memiliki nilai dan informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi yang menggunakannya.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah Kepala Desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah bersama kementerian dalam negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Patricia et al (2019) mengemukakan bahwa Sistem Keuangan Desa juga memiliki tujuan dalam menilai kinerja pemerintah desa. SISKEUDES memiliki peran penting dalam Pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh perangkat desa, hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan SISKEUDES, yaitu membantu pekerjaan pemerintah desa.

Penerapan Siskeudes sudah mulai diimplementasikan di desa-desa sejak tahun 2016 atas dasar Nota Kesepahaman bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, pada tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran menyangkut kewajiban desa untuk menggunakan aplikasi Siskeudes yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, yaitu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 145/8350/BPD dan Surat Edaran menyangkut kewajiban desa menggunakan SISKEUDES berbasis online dalam surat edaran Nomor 100.3.3.3/5552/BPD. Hal ini didukung dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01-16/08/2016. Sebagaimana menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah desa agar mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan dari diterapkannya Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa. Dengan diterapkan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) diharapkan dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga dalam kinerja aparat desa semakin membaik dan penggunaan sistem tersebut dapat lebih efektif.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini memiliki kelebihan dan kelemahan, adapun kelebihan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu, sesuai peraturan, memudahkan tata kelola

keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian interen, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Kelemahan dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu, sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para aparatur sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diberikan bagi para aparatur.

Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menjelaskan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Tugas Kepala Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Tugas Perangkat Desa meliputi penyelenggaraan tugas teknis di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab seksi atau bagian yang dipimpinnya, serta membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa sangat mempengaruhi kinerja pemerintah desa secara keseluruhan. Apabila pemerintah desa dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, maka kinerja pemerintah desa akan meningkat. Hal ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pemerintah desa. Kinerja yang baik akan mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan desa dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Noferius Giawa (2023), mengemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa sangat tergantung pada kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Aparat desa yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta berintegritas tinggi akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan,

Lestiana et al (2023) mengemukakan bahwa tujuan dari diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam mengembangkan SISKEUDES adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa.

Kecamatan Atinggola merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, kecamatan ini berbatasan langsung dengan provinsi Sulawesi utara, Kecamatan atinggola terdiri dari empat belas Desa, diantaranya adalah Desa Imana, Desa Ilomata, Desa Bintana, Desa Monggupo, Desa Kota Jin, Desa Pinontoyonga, Desa Buata, Desa Wapalo, Desa Iloheluma, Desa Sigaso, Desa Oluhuta, Desa Kotajin Utara, Desa Tombulilato dan Desa Posono.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa rendahnya kinerja pemerintah desa terindikasi dipicu oleh sulitnya memahami penggunaan aplikasi SISKEUDES, sehingga selalu menggunakan bantuan dari orang ketiga dalam proses penginputan perencanaan anggaran kegiatan desa, karena aplikasi yang setiap tahunnya berganti versi dan penambahan fitur-finur menu yang diterapkan sehingga para aparatur sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan SISKEUDES yang diberikan bagi para aparatur membuat kinerja pemerintahan desa menjadi terhambat. Dengan adanya Pengelolaan keuangan desa tentunya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan, tanpa kemampuan dan pengetahuan yang baik akan memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Banyak desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam hal kompetensi, terutama di bidang teknologi dan akuntansi, termasuk aplikasi keuangan berbasis komputer seperti SISKEUDES yang biasa mengalami pembaharuan versi dan fitur serta sistem backup database antara offline dan online, yang menuntut aparat desa untuk mengikuti pelatihan, jika aparat desa kurang memiliki dukungan teknis dalam penerapan SISKEUDES, pengelolaan anggaran yang tidak efisien bisa berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan program desa, dengan adanya bimbingan dan bantuan dari pihak tenaga pendamping desa dan atau pihak lainnya tetap belum memenuhi ketentuan yang optimal.

Gusti et al (2017) dalam penelitiannya dengan judul (peranan sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Muksin dan Abjan (2019) dalam penelitiannya dengan judul (pengaruh sistem informasi keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja kepala desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan), hasil penelitian menunjukkan

bahwa sistem informasi keuangan desa (siskeudes) berpengaruh terhadap kinerja kepala desa di Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan

Patricia et al (2019) dalam penelitiannya dengan judul (peranan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). Lestiana et al (2023) dalam hasil penelitiannya dengan judul (pengaruh sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Doreng), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Doreng. Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang mengumpulkan dan menganalisis data numerik untuk menggambarkan karakteristik objek penelitian (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini berlandaskan pada positivisme, yang menekankan pengukuran objektif untuk memahami realitas, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguji hipotesis melalui analisis statistik. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji keabsahan dan keandalannya. Data dianalisis menggunakan teknik statistik. Temuan dari penelitian berkontribusi dalam pengujian hipotesis yang telah dibuat.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas Data

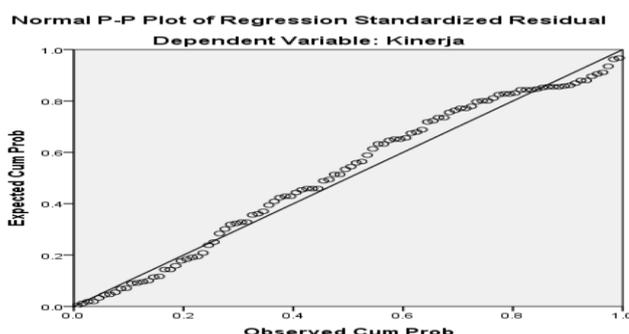
Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi adalah normalitas data atau sebaran yang normal untuk variabel dependen. Dalam uji asumsi yang pertama harus dilakukan adalah uji normalitas, jika sebaran data tidak normal, analisis tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan normalitas data. Pada penelitian ini, kinerja merupakan variabel endogen sehingga residu harus berdistribusi normal untuk memenuhi syarat pengujian regresi, uji normalitas data menggunakan bantuan komputer software SPSS relase 20.0.

Tabel 1. Uji Normalitas Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Test Statistic	0.101
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji normalitas dengan perhitungan Kolmogorov- Smirnov Asymp. Sig. Persamaan regresi kinerja Asymp. Sig.(2-tailed) 0.101 signifikansi di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa residual persamaan kinerja yang diteliti berdistribusi normal, karena uji asumsi normalitas telah terpenuhi maka dapat digunakan teknik statistik persamaan dengan regresi.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot

Diketahui bahwa residual dalam model regresi menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Residual berdistribusi normal, sehingga analisis data kuantitatif dengan analisis regresi dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi uji persyaratan ini.

Hasil Analisis Regresi

Setelah memastikan bahwa data memenuhi syarat normalitas, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi untuk menguji hubungan antara sistem keuangan desa terhadap kinerja. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear sederhana. Metode statistik yang akan diterapkan adalah regresi sederhana dengan model regresi yang akan dibahas sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bx \text{ (Sugiyono, 2018)}$$

Keterangan:

\hat{Y} : Kinerja

X: Sistem Keuangan Desa

Analisis regresi yang dilakukan dengan bantuan SPSS menghasilkan temuan yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.846	4.025		6.421	.000
	Sistem Keuangan Desa	.474	.079	.516	5.966	.000

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2024.

Hasil regresi menunjukkan persamaan model $Y = 25.846 + 0,474X$. Setiap peningkatan dalam variabel sistem keuangan desa diprediksikan meningkatkan kinerja sebesar 0,474. Nilai koefisien regresi yang positif yang mengindikasikan adanya pengaruh positif sistem keuangan desa terhadap kinerja.

Pengujian Hipotesis

Dengan rampungnya estimasi model, penelitian ini beralih ke pengujian berikutnya, yakni menilai signifikansi pengaruh sistem keuangan desa terhadap kinerja. Berikut disajikan tahapan-tahapan pengujian yang akan dilakukan:

1. Penentuan Hipotesis, H_0 : tidak ada cukup bukti kuat yang menunjukkan bahwa sistem keuangan desa terhadap kinerja memiliki efek positif dan H_1 : terdapat pengaruh positif dari variabel sistem keuangan desa terhadap kinerja.
2. Penetapan dalam penelitian ini kemungkinan 5% hasil yang diperoleh adalah keliru, dengan menetapkan tingkat kepercayaan 95%.
3. Penentuan statistik uji t diterapkan untuk memahami apakah model regresi memiliki pengaruh yang signifikan.
4. Penentuan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) dalam pengujian ini didasarkan pada perbandingan. Dalam pengujian statistik, nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel (t-table). Apabila nilai t hitung lebih besar, maka H_0 akan ditolak. Nilai signifikansi yang dihasilkan dari analisis dapat dibandingkan dengan nilai alpha yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah H_0 diterima atau ditolak. Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada alpha, maka H_0 tidak ditolak. Berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS:

Tabel 3 Hasil Penentuan Kriteria Uji Regresi Secara Parsial

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.846	4.025		6.421	.000
Sistem Keuangan Desa	.474	.079	.516	5.966	.000

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2024.

Berdasarkan hasil analisis, nilai t-hitung untuk variabel sistem keuangan desa adalah 5,966. Untuk menentukan apakah Ho diterima atau ditolak, nilai t-tabel dihitung dengan tingkat signifikansi statistik 5%. Nilai t-tabel yang diperoleh adalah 1,660. Perbandingan menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel. Hal ini mengantarkan pada penolakan Ho, yang menyiratkan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem keuangan desa terhadap kinerja.

Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat desa. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak tersebut. Nilai koefisien determinasi dianalisis untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai ini berkisar antara 0% hingga 100%, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan proporsi penjelasan yang lebih besar. Berikut tingkat kecocokan antara variabel dalam model regresi sistem keuangan desa terhadap kinerja berikut ini:

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.266	.259	4.163

a. Predictors: (Constant), Sistem Keuangan Desa

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Primer di atas yang diolah SPSS, 2024.

Analisis regresi menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,266, yang mengindikasikan bahwa 26,6% variasi kinerja dijelaskan oleh sistem keuangan desa. Hal ini menandakan hubungan positif antara sistem keuangan desa terhadap kinerja, dimana semakin baik penggunaan sistem keuangan desa yang, maka akan semakin meningkat pula kinerja aparat desa, 73,4% sisanya, atau nilai residu, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diinvestigasi dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, hasil penelitian dengan model analisis pengaruh langsung (direct effect), hipotesis tersebut merupakan hipotesis alternatif, sedangkan hipotesis nol atau nihil menyatakan tidak ada pengaruh. Melalui perbandingan antara nilai uji-t dan uji-f yang dihasilkan dalam analisis komputer dengan nilai t tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$, maka diperoleh nilai tabel t sebesar 1,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Secara ringkas untuk pembahasan variabel bebas terhadap variabel terikat diuraikan sesuai dengan urutan hipotesis penelitian yang diajukan, besarnya pengaruh bervariasi untuk masing-masing variabel yang diteliti variabel bebas terhadap variabel terikat berbeda-beda. Dengan demikian pengujian hipotesis dari model analisis regresi yang telah dibangun sesuai dengan teori yang dikehendaki, untuk lebih jelasnya secara rinci dalam pembahasan diuraikan sebagai berikut.

Dalam penelitian mengenai pengaruh sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, ditemukan bahwa variabel sistem keuangan desa memiliki sebaran jawaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel kinerja pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya variasi pemahaman dan persepsi yang lebih luas di kalangan perangkat desa terkait sistem keuangan yang diterapkan di desa. Sebaran jawaban yang tinggi pada variabel sistem keuangan desa mengindikasikan perbedaan dalam pengalaman, akses, dan pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan, sedangkan kinerja pemerintah desa cenderung dinilai lebih konsisten. Perbedaan sebaran ini menunjukkan bahwa perangkat desa mungkin memerlukan pelatihan atau panduan tambahan untuk mencapai kesamaan persepsi,

sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa di tingkat pemerintahan desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisis dengan regresi sederhana dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, hasil analisis juga membuktikan signifikan, yang dapat dilihat dari nilai t hitung terbukti lebih besar dari nilai t tabel. Sistem keuangan desa merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sistem ini mencakup seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hubungan antara sistem keuangan desa dan kinerja aparat desa sangat erat, di mana kualitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja aparat desa. Dengan demikian hipotesisi penelitian yang berbunyi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan diterima.

Lestianan et al (2023) mengemukakan bahwa dengan adanya sistem keuangan desa memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) terbukti telah membantu kinerja aparat desa dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Adanya sistem keuangan desa yang akuntabel serta transparan telah meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Muksin dan Abjan (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan desa (siskeudes) berpengaruh terhadap kinerja kepala desa di Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil yang sama juga dikemukakan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Patricia dan Lintje (2019), penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di Desa Kapataran Kec. Lembean Timur Kab. Minahasa).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan teoritis empiris dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, tanda positif mempunyai makna bahwa semakin baik penggunaan sistem keuangan desa, maka akan semakin meningkat pula kinerja aparat desa, jika terjadi perubahan pada sistem keuangan desa maka akan terjadi perubahan kinerja aparat desa pada arah yang sama. Nilai koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa variasi kinerja dijelaskan oleh sistem keuangan desa. Hal ini menandakan hubungan positif antara antara sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dimana semakin semakin baik penggunaan sistem keuangan desa, semakin meningkat pula kinerja aparat desa.

SARAN

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran berikut perlu dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Pemerintah desa melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, dengan fokus khusus pada pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- 2) Pemerintah desa mengembangkan modul pelatihan yang menyeluruh agar aparat desa dapat memahami prosedur dan mekanisme keuangan desa dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 3) Pemerintah desa melaksanakan pelaporan keuangan baik laporan semesteran maupun tahunan dengan cermat dan tepat waktu yang tidak hanya memenuhi administratif, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan tata kelola yang baik, kemudian di laporkan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan atau yang berwenang, agar dengan adanya laporan keuangan tersebut pemerintah desa dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan kualitas pelayanan public, dan memperoleh dukungan dari masyarakat.
- 4) Pemerintah desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa agar suara dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam pengelolaan dana desa.
- 5) Pemerintah desa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui keterlibatan masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa dapat terbangun dengan lebih baik.
- 6) Pemerintah desa menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, D. A. (2016). Analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa (Studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adisasmita, R. (2015). Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amir, M. F. (2016). Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi. Jakarta: Mitra Wacana.
- Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. (2016). Manajemen Sumber Daya. Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Fitri. (2015). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Vatunonju. Jurnal Katalogis, 3 (11), 180-192.
- Noferius Giawa (2023), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Orsedes Kecamatan Boronadu Kabupaten Nis Selatan, Jurnal EMBA Vol. 11 No. 4 Oktober 2023, Hal. 506-515
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lembaga Adminitrasi Negara (LAN).RI (2013), Metode penelitian administrasi publik / Harbani Pasolong. Pengarang, Harbani Pasolong. EDISI, Cet. 2. Penerbitan, Bandung : Alfabeta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id>
- Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, Putu Sukma Kurniawan. (2018). peranan sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan), 8 (2).
- Irham. (2016). Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jefri, A. (2023). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Menciptakan Kampung Bebas Narkoba Di Desa Pagar Merbau III, Skripsi. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Kasmir. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lastiana Felisitas, Wilhelmina Mitani, & Fransiscus De Romario. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Doreng. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1 (4), 276-291. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2051>
- Mangkunegara. (2015). Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan kedua belas. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muksin & Abjan. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). Indonesian Journal On Information System, 4 (1), 13,24.
- Muslim & Irwan. (2014). Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2), 99-110.
- Nursalam. (2015). Manajemen Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.
- Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, I Gede. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). Indonesia Accounting Journal, 1 (2), 105-111.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (1), 82-95.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD Tanggal 27 November 2015 Tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.
- Tampubolon. (2014). *Manajemen Operasi dan Rantai Pemasok*. Jakarta. Mitra Wacana.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Widari dan Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5 (10), 117-126.